

**RENCANA AKSI SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG KOORDINASI INVESTASI DAN PERTAMBANGAN
DEPUTI BIDANG KOORDINASI INVESTASI DAN PERTAMBANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Komponen	Target Keberhasilan 2023	Target per Triwulan				Total Anggaran	Uraian Rencana Kegiatan	
			Output	Anggaran	% Target Capaian	(Fishbone)			
Indikator Kinerja : Persentase Dokumen Reformasi Birokrasi Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang Dapat Disediakan Tepat Waktu									
1	Dokumen Reformasi Birokrasi	4 (empat) Dokumen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	B03 :	Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi TW I TA 2023	Rp 95,000,000	100%	Rp 380,000,000	B03	Rapat Internal, Rapat Koordinasi Agent of Change, Rapat Pembahasan Renja RB, Rapat Monitoring RB TW I, Rapat Pembahasan RB terkait Perubahan Mekanisme Penilaian dari PMPRB menjadi Tematik.
			B06 :	Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi TW II TA 2023	Rp 95,000,000	100%		B06	Rapat Monitoring RB TW II, Workshop Reformasi Birokrasi, Bimbingan Teknis PPID, Kunjungan Lapangan <i>Benchmarking</i> Implementasi RB serta Penguatan Pembangunan ZI.
			B09 :	Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi TW III TA 2023	Rp 95,000,000	100%		B09	Rapat Monitoring RB TW III, Persiapan penilaian PMPRB, Rapat Monev Agent of Change
			B12 :	Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi TW IV TA 2023	Rp 95,000,000	100%		B12	Rapat Monitoring RB TW IV, Rapat Monev Agent of Change
Indikator Kinerja : Persentase Penyelesaian Dokumen Ketatausahaan Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang Dihasilkan									
2	Dokumen Ketatausahaan	4 (empat) Dokumen Laporan Ketatausahaan	B03 :	Laporan Ketatausahaan TW I TA 2023	Rp 125,000,000	100%	Rp 500,000,000.00	B03	Rapat Internal, Sosialisasi Permenko terkait Persuratan dan Bimbingan Teknis Aplikasi SRIKANDI, Sosialisasi Petunjuk Teknis Penyusunan Pelaporan dan Pengelolaan Inventaris Barang Milik Negara (BMN), Bimbingan Teknis Penyusunan SKP, Pengelolaan Persuratan
			B06 :	Laporan Ketatausahaan TW II TA 2023	Rp 125,000,000	100%		B06	Rapat Internal, Workshop Peningkatan Kapasitas Kompetensi Pegawai, Pengelolaan Persuratan di Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, Pelaksanaan Diklat bagi Pegawai
			B09 :	Laporan Ketatausahaan TW III TA 2023	Rp 125,000,000	100%		B09	Rapat Internal, Pengelolaan Persuratan di Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, Workshop Peningkatan Kapasitas Kompetensi Pegawai
			B12 :	Laporan Ketatausahaan TW IV TA 2023	Rp 125,000,000	100%		B12	Rapat Internal, Pengelolaan Persuratan di Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, Workshop Peningkatan Kapasitas Kompetensi Pegawai
Indikator Kinerja : Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang Sesuai Ketentuan									
3	Dokumen Perencanaan	9 (sembilan) Dokumen Perencanaan	B03 :	Dokumen Revisi RKA-KL TW I TA 2023	Rp 540,000,000	100%	Rp 4,840,000,000	B03	Rapat Internal, Rapat Penyusunan Rencana Kerja, Benchmarking
			B06 :	Dokumen Revisi RKA-KL TW II TA 2023	Rp 1,100,000,000	100%		B06	Rapat Internal, Bimtek RKA-KL, Penyusunan KAK dan RAB, Rapat Trilateral Meeting, Rapat Penelaahan Revisi RKA-KL.
			B09 :	Dokumen Revisi RKA-KL TW III TA 2023	Rp 1,100,000,000	100%		B09	Rapat Internal, Rapat Reviu Rencana Strategis, Rapat Koordinasi Program Kerja.
			B12 :	1. Dokumen Rencana Strategis	Rp 1,100,000,000	100%		B12	Rapat Internal Kunjungan Lapangan, In-Depth Study, Workshop, Rapat Koordinasi, Penyusunan Laporan
				2. Dokumen Rencana Kerja					
				3. Dokumen Revisi RKA-KL TW IV					
4. Dokumen Strategis Dukungan Penanganan Sengketa atau Permasalahan Investasi dan Perdagangan									
5. Dokumen Strategis Koordinasi Kerjasama Investasi Luar dan Dalam Negeri									
6. Dokumen Strategis Produk Domestik Bruto Kemaritiman									
Indikator Kinerja : Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang Sesuai Ketentuan									
				1. Dokumen Perjanjian Kinerja					
				2. Dokumen Laporan Kinerja TA 2022					
				3. Dokumen Laporan Kegiatan TA 2022					
			R03 :		Rp 220.000.000	100%		R03	Rapat Internal, Rapat Penandatanganan Perjanjian Kinerja, Rapat Penyusunan Rencana Aksi dan Manual IKU, Rapat Pemantauan

3	Dokumen Pelaporan Kinerja dan Kegiatan	19 (sembilan belas) Dokumen Laporan Kinerja dan Kegiatan	B03 :	4. Dokumen Laporan Kegiatan Bulan Desember TA 2022	Rp 220,000,000	100%	Rp 880,000,000	B03	Penyusunan rencana Aksi dan Manual IKU, Rapat Pemantauan dan Evaluasi Triwulan IV	
				5. Dokumen Laporan Kegiatan Bulan Januari TA 2023						
				6. Dokumen Laporan Kegiatan Bulan Februari TA 2023						
			B06 :	1. Dokumen Laporan Kinerja TW I TA 2023	Rp 220,000,000	100%		B06	Rapat Internal, Rapat Pemantauan dan Evaluasi Triwulan I, Kunjungan Lapangan.	
				2. Dokumen Laporan Kegiatan Bulan Maret TA 2023						
				3. Dokumen Laporan Kegiatan Bulan April TA 2023						
				4. Dokumen Laporan Kegiatan Bulan Mei TA 2023						
			B09 :	1. Dokumen Laporan Kinerja TW II TA 2023	Rp 220,000,000	100%		B09	Rapat Internal, Rapat Pemantauan dan Evaluasi Triwulan II, Bimbingan Teknis Penyusunan <i>Policy Brief</i> .	
				2. Dokumen Laporan Kegiatan Bulan Juni TA 2022						
				3. Dokumen Laporan Kegiatan Bulan Juli TA 2022						
				4. Dokumen Laporan Kegiatan Bulan Agustus TA 2022						
			B12 :	1. Dokumen Laporan Kinerja TW III TA 2023	Rp 220,000,000	100%		B12	Rapat Internal, Rapat Pemantauan dan Evaluasi Triwulan III, Rapat Pengumpulan Data Kinerja, Rapat Pemantauan dan Evaluasi	
				2. Dokumen Dukungan Kebijakan Strategis Deputi						
				3. Dokumen Laporan Kegiatan Bulan September TA 2022						
				4. Dokumen Laporan Kegiatan Bulan Oktober TA 2022						
				5. Dokumen Laporan Kegiatan Bulan November TA 2022						

Plt. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi



Rifky Setiawan

**RENCANA AKSI ASISTEN DEPUTI STRATEGI DAN KEBIJAKAN PERCEPATAN INVESTASI
DEPUTI BIDANG KOORDINASI INVESTASI DAN PERTAMBANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Komponen	Target Keberhasilan 2023	Target per Triwulan			Total Anggaran	Uraian Rencana Kegiatan		Evidence	
			Output	Anggaran	% Target Capaian		(Fishbone)			
Indikator Kinerja : Persentase Rumusan Kebijakan di Bidang Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi yang Ditindaklanjuti										
1	Pengendalian Kebijakan Percepatan Integrasi Sistem Perizinan Undang-Undang Cipta Kerja	Ditindaklanjutinya Rumusan Kebijakan Pengendalian Percepatan Integrasi Sistem Perizinan Undang-Undang Cipta Kerja	B03 :	Policy Issue (Agenda Kebijakan) Bab I : Identifikasi permasalahan Pengendalian Percepatan Integrasi Sistem Perizinan Undang-Undang Cipta Kerja	Rp 137,500,000	25%	Rp 550,000,000	B03 :	Rapat Koordinasi : Rp 100,000,000 Kunjungan Lapangan : Rp 37,500,000	Policy Memo Identifikasi permasalahan Pengendalian Percepatan Integrasi Sistem Perizinan Undang-Undang Cipta Kerja
			B06 :	Policy Analysis (Problem Statement) Bab II : Tersedianya data permasalahan Pengendalian Percepatan Integrasi Sistem Perizinan Undang-Undang Cipta Kerja	Rp 275,000,000	50%		B06 :	Rapat Koordinasi : Rp 100,000,000 Kunjungan Lapangan : Rp 37,500,000	Policy Memo data permasalahan Pengendalian Percepatan Integrasi Sistem Perizinan Undang-Undang Cipta Kerja
			B09 :	Policy Option (Pilihan Kebijakan) Bab III : Tersedianya pilihan kebijakan Pengendalian Percepatan Integrasi Sistem Perizinan Undang-Undang Cipta Kerja	Rp 412,500,000	75%		B09 :	FGD : Rp 50,000,000 Rapat Koordinasi : Rp 50,000,000 Kunjungan Lapangan : Rp 37,500,000	Policy Memo pilihan kebijakan Pengendalian Percepatan Integrasi Sistem Perizinan Undang-Undang Cipta Kerja
			B12 :	Policy Paper (Kertas Kerja Kebijakan) Bab IV : Tersedianya Kertas Kerja Kebijakan Pengendalian Percepatan Integrasi Sistem Perizinan Undang-Undang Cipta Kerja	Rp 550,000,000	100%		B12 :	Rapat Evaluasi : Rp 50,000,000 FGD : Rp 87,500,000	Policy Paper Tindak Lanjut Pengendalian Percepatan Integrasi Sistem Perizinan Undang-Undang Cipta Kerja
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Percepatan Investasi Tol Sumatera	Ditindaklanjutinya Rumusan Kebijakan Koordinasi dan Sinkronisasi Percepatan Investasi Tol Sumatera	B03 :	Policy Issue (Agenda Kebijakan) Bab I : Identifikasi permasalahan Pembebasan lahan JTTS	Rp 173,699,500	25%	Rp 694,798,000	B03 :	Rapat Koordinasi : Rp 50,000,000 Kunjungan Lapangan : Rp 63,699,500 FGD : Rp 60,000,000	Policy Memo Identifikasi permasalahan Pembebasan lahan JTTS
			B06 :	Policy Analysis (Problem Statement) Bab II : Tersedianya data permasalahan Pembebasan lahan JTTS yang akan ditindaklanjuti	Rp 347,399,000	50%		B06 :	Rapat Koordinasi : Rp 100,000,000 Kunjungan Lapangan : Rp 73,699,500	Policy Memo data permasalahan Pembebasan lahan JTTS yang akan ditindaklanjuti
			B09 :	Policy Option (Pilihan Kebijakan) Bab III : Tersedianya pilihan kebijakan untuk menindaklanjuti permasalahan Pembebasan lahan JTTS	Rp 521,098,500	75%		B09 :	FGD : Rp 50,000,000 Rapat Koordinasi : Rp 60,000,000 Kunjungan Lapangan : Rp 63,699,500	Policy Memo pilihan kebijakan untuk menindaklanjuti permasalahan Pembebasan lahan JTTS
			B12 :	Policy Paper (Kertas Kerja Kebijakan) Bab IV : Tersedianya Kertas Kerja Kebijakan untuk menindaklanjuti permasalahan Pembebasan lahan JTTS	Rp 694,798,000	100%		B12 :	Rapat Koordinasi : Rp 100,000,000 FGD : Rp 73,699,500	Policy Paper tindaklanjut permasalahan Pembebasan lahan JTTS
Indikator Kinerja : Persentase isu-isu strategis yang diselesaikan										
3	Major Project Jalan Tol Trans Sumatera Aceh – Lampung	Terselesainya pembebasan lahan Major Project Jalan Tol Trans Sumatera Aceh – Lampung Tahap 1	B03 :	Laporan Pemantauan Isu Strategis TW I (Tersedianya Hasil Identifikasi permasalahan penlok JTTS)	Rp 18,750,000	25%	Rp 75,000,000			Laporan Kegiatan sekaligus capaian
			B06 :	Laporan Pemantauan Isu Strategis TW II (Terlaksananya tindak lanjut Pelepasan kawasan Hutan)	Rp 37,500,000	50%				Laporan Kegiatan sekaligus capaian
			B09 :	Laporan Pemantauan Isu Strategis TW III (Terlaksananya tindak lanjut pemenuhan KKPR)	Rp 56,250,000	75%				Laporan Kegiatan sekaligus capaian
			B12 :	Laporan Penyelesaian Target Isu Strategis (Terlaksananya Proses pengadaan Lahan)	Rp 75,000,000	100%				Laporan Kegiatan sekaligus capaian

**RENCANA AKSI ASISTEN DEPUTI STRATEGI DAN KEBIJAKAN PERCEPATAN INVESTASI
DEPUTI BIDANG KOORDINASI INVESTASI DAN PERTAMBANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Komponen	Target Keberhasilan 2023	Target per Triwulan			Total Anggaran	Uraian Rencana Kegiatan		Evidence
			Output	Anggaran	% Target Capaian		(Fishbone)		
4	Major Project Proyek Strategis Nasional Bendungan Lausimeme	Terselesainya pembebasan lahan Major Project Proyek Strategis Nasional Bendungan Lausimeme	B03 :	Laporan Pemantauan Isu Strategis TW I (Terlaksananya Proses pendekatan ke masyarakat)	Rp 18,750,000	25%	Rp 75,000,000		Laporan Kegiatan sekaligus capaian
			B06 :	Laporan Pemantauan Isu Strategis TW II (Terlaksananya Proses tata batas kawasan hutan)	Rp 37,500,000	50%			Laporan Kegiatan sekaligus capaian
			B09 :	Laporan Pemantauan Isu Strategis TW III (Terlaksananya Proses penetapan area penggunaan lain (APL))	Rp 56,250,000	75%			Laporan Kegiatan sekaligus capaian
			B12 :	Laporan Penyelesaian Target Isu Strategis (Terselesaikannya Proses pengadaan Lahan)	Rp 75,000,000	100%			Laporan Kegiatan sekaligus capaian
5	Janji Presiden Mempermudah Izin Investasi	Terselesainya proses integrasi 200 RDTR yang telah ditetapkan ke dalam sistem OSS	B03 :	Laporan Pemantauan Isu Strategis TW I (Tersedianya Hasil Identifikasi permasalahan proses perumusan RDTR)	Rp 24,112,500	25%	Rp 96,450,000		Laporan Kegiatan sekaligus capaian
			B06 :	Laporan Pemantauan Isu Strategis TW II (Terlaksananya proses lintas sektor (linsek) perumusan RDTR)	Rp 48,225,000	50%			Laporan Kegiatan sekaligus capaian
			B09 :	Laporan Pemantauan Isu Strategis TW III (Terlaksananya proses penetapan RDTR)	Rp 72,337,500	75%			Laporan Kegiatan sekaligus capaian
			B12 :	Laporan Penyelesaian Target Isu Strategis (Terwujudnya Proses integrasi RDTR ke OSS)	Rp 96,450,000	100%			Laporan Kegiatan sekaligus capaian

Asisten Deputi Strategi dan
Kebijakan Percepatan Investasi,



Feri Akbar

**RENCANA AKSI ASISTEN DEPUTI INVESTASI BIDANG JASA
DEPUTI BIDANG KOORDINASI INVESTASI DAN PERTAMBANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Komponen	Target Keberhasilan 2023	Target per Triwulan			Total Anggaran	Uraian Rencana Kegiatan		Evidence Antara Triwulan	
			Output	Anggaran	% Target Capaian		(Fishbone)			
Indikator Kinerja : Persentase Rumusan Kebijakan di Bidang Investasi Bidang Jasa yang Ditindaklanjuti										
1	Rumusan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Investasi Sektor Jasa Perdagangan	Ditindaklanjutinya Rumusan Kebijakan Investasi Sektor Jasa Perdagangan	B03 :	Policy Issue (Agenda Kebijakan) Bab I : Identifikasi isu kebijakan investasi sektor jasa perdagangan	Rp 160,589,750	25%	Rp 642,359,000	B03 :	Rapat internal, Rapat Koordinasi lintas K/L, Kunjungan Lapangan	Policy Memo/Draft Kertas Kerja Kebijakan Bab I
			B06 :	Policy Analysis (Problem Statement) Bab II : Tersedianya data dan informasi terkait isu kebijakan investasi sektor jasa perdagangan	Rp 321,179,500	50%		B06 :	Rapat Koordinasi lintas K/L, FGD, Kunjungan Lapangan	Policy Memo/Draft Kertas Kerja Kebijakan Bab II
			B09 :	Policy Option (Pilihan Kebijakan) Bab III : Tersedianya pilihan kebijakan investasi sektor jasa perdagangan	Rp 481,769,250	75%		B09 :	Rapat Koordinasi lintas K/L, Kunjungan Lapangan	Policy Memo/Draft Kertas Kerja Kebijakan Bab III
			B12 :	Policy Paper (Kertas Kerja Kebijakan) Bab IV : Tersedianya Kertas Kerja Kebijakan investasi sektor jasa perdagangan	Rp 642,359,000	100%		B12 :	Rapat internal penyusunan Kertas Kerja Kebijakan, Rapat monitoring dan evaluasi	Policy Paper
2	Rumusan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Investasi Sektor Jasa Infrastruktur dan Logistik	Ditindaklanjutinya Rumusan Kebijakan Investasi Sektor Jasa Infrastruktur dan Logistik	B03 :	Policy Issue (Agenda Kebijakan) Bab I : Identifikasi isu Kebijakan Investasi Sektor Jasa Infrastruktur dan Logistik	Rp 155,589,000	25%	Rp 622,356,000	B03 :	Rapat internal, Rapat Koordinasi lintas K/L, Kunjungan Lapangan	Policy Memo/Draft Kertas Kerja Kebijakan Bab I
			B06 :	Policy Analysis (Problem Statement) Bab II : Tersedianya data dan informasi terkait Kebijakan Investasi Sektor Jasa Infrastruktur dan Logistik	Rp 311,178,000	50%		B06 :	Rapat Koordinasi lintas K/L, FGD, Kunjungan Lapangan	Policy Memo/Draft Kertas Kerja Kebijakan Bab II
			B09 :	Policy Option (Pilihan Kebijakan) Bab III : Tersedianya pilihan kebijakan Kebijakan Investasi Sektor Jasa Infrastruktur dan Logistik	Rp 466,767,000	75%		B09 :	Rapat Koordinasi lintas K/L, Kunjungan Lapangan	Policy Memo/Draft Kertas Kerja Kebijakan Bab III
			B12 :	Policy Paper (Kertas Kerja Kebijakan) Bab IV : Tersedianya Kertas Kerja Kebijakan Investasi Sektor Jasa Infrastruktur dan Logistik	Rp 622,356,000	100%		B12 :	Rapat internal penyusunan Kertas Kerja Kebijakan, Rapat monitoring dan evaluasi	Policy Paper
3	Rumusan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Investasi Sektor Jasa Pariwisata, Kesehatan dan Jasa Lainnya	Ditindaklanjutinya Rumusan Kebijakan Investasi Sektor Jasa Pariwisata, Kesehatan dan Jasa Lainnya	B03 :	Policy Issue (Agenda Kebijakan) Bab I : Identifikasi isu Kebijakan Investasi Sektor Jasa Pariwisata, Kesehatan dan Jasa Lainnya	Rp 137,062,500	25%		B03 :	Rapat internal, Rapat Koordinasi lintas K/L, Kunjungan Lapangan	Policy Memo/Draft Kertas Kerja Kebijakan Bab I

**RENCANA AKSI ASISTEN DEPUTI INVESTASI BIDANG JASA
DEPUTI BIDANG KOORDINASI INVESTASI DAN PERTAMBANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Komponen	Target Keberhasilan 2023	Target per Triwulan			Total Anggaran	Uraian Rencana Kegiatan		Evidence Antara Triwulan
			Output	Anggaran	% Target Capaian		(Fishbone)		
	dan Jasa Lainnya		B06 :	Policy Analysis (Problem Statement) Bab II : Tersedianya data dan informasi terkait isu Kebijakan Investasi Sektor Jasa Pariwisata, Kesehatan dan Jasa Lainnya	Rp 274,125,000	50%	B06 :	Rapat Koordinasi lintas K/L, FGD, Kunjungan Lapangan	Policy Memo/Draft Kertas Kerja Kebijakan Bab II
			B09 :	Policy Option (Pilihan Kebijakan) Bab III : Tersedianya pilihan Kebijakan Investasi Sektor Jasa Pariwisata, Kesehatan dan Jasa Lainnya	Rp 411,187,500	75%	B09 :	Rapat Koordinasi lintas K/L, Kunjungan Lapangan	Policy Memo/Draft Kertas Kerja Kebijakan Bab III
			B12 :	Policy Paper (Kertas Kerja Kebijakan) Bab IV : Tersedianya Kertas Kerja Kebijakan Investasi Sektor Jasa Pariwisata, Kesehatan dan Jasa Lainnya	Rp 548,250,000	100%	B12 :	Rapat internal penyusunan Kerta Kerja Kebijakan, Rapat monitoring dan evaluasi	Policy Paper
Indikator Kinerja : Persentase isu-isu strategis yang diselesaikan									
4	Proyek Strategis Nasional Pembangunan Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung	Terkoordinasinya optimalisasi pelabuhan Kuala Tanjung	B03 :	Laporan Pemantauan Isu Strategis TW I (restrukturisasi financial PT Prima Multi Terminal)	Rp 19,410,250	25%	B03 :	Rapat internal, Rapat Koordinasi lintas K/L, Kunjungan Lapangan	Laporan Kegiatan capaian output
			B06 :	Laporan Pemantauan Isu Strategis TW II (Re-master plan Pelabuhan Kuala Tanjung)	Rp 38,820,500	50%	B06 :	Rapat Koordinasi lintas K/L, FGD, Kunjungan Lapangan	Laporan Kegiatan capaian output
			B09 :	Laporan Pemantauan Isu Strategis TW III (Pembebasan lahan kawasan industri Kuala Tanjung)	Rp 58,230,750	75%	B09 :	Rapat Koordinasi lintas K/L, Kunjungan Lapangan	Laporan Kegiatan capaian output
			B12 :	Laporan Penyelesaian Target Isu Strategis Terkoordinasinya optimalisasi Pelabuhan Kuala Tanjung	Rp 77,641,000	100%	B12 :	Rapat monitoring dan evaluasi	Laporan Kegiatan capaian output
5	Proyek Strategis Nasional Pembangunan Pelabuhan Palembang Baru/New Palembang	Terkoordinasinya Pembangunan Pelabuhan Palembang Baru/New Palembang	B03 :	Laporan Pemantauan Isu Strategis TW I (Revisi studi pendahuluan dan disesuaikan dengan hasil studi KKP)	Rp 14,411,000	25%	B03 :	Rapat internal, Rapat Koordinasi lintas K/L, Kunjungan Lapangan	Laporan Kegiatan capaian output
			B06 :	Laporan Pemantauan Isu Strategis TW II (Timeline untuk setiap milestone)	Rp 28,822,000	50%	B06 :	Rapat Koordinasi lintas K/L, FGD, Kunjungan Lapangan	Laporan Kegiatan capaian output
			B09 :	Laporan Pemantauan Isu Strategis TW III (Permasalahan lokasi)	Rp 43,233,000	75%	B09 :	Rapat Koordinasi lintas K/L, Kunjungan Lapangan	Laporan Kegiatan capaian output
			B12 :	Laporan Penyelesaian Target Isu Strategis Terkoordinasinya Pembangunan Pelabuhan Palembang Baru/New Palembang	Rp 57,644,000	100%	B12 :	Rapat monitoring dan evaluasi	Laporan Kegiatan capaian output
6	Janji Presiden PLTS Terapung Terbesar di Asia Tenggara	Terkoordinasinya Pembangunan PLTS Terapung Cirata	B03 :	Laporan Pemantauan Isu Strategis TW I (Pembahasan mengenai zonasi penggunaan waduk)	Rp 12,937,500	25%	B03 :	Rapat internal, Rapat Koordinasi lintas K/L, Kunjungan Lapangan	Laporan Kegiatan capaian output

**RENCANA AKSI ASISTEN DEPUTI INVESTASI BIDANG JASA
DEPUTI BIDANG KOORDINASI INVESTASI DAN PERTAMBANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Komponen	Target Keberhasilan 2023	Target per Triwulan			Total Anggaran	Uraian Rencana Kegiatan (Fishbone)		Evidence Antara Triwulan
			Output	Anggaran	% Target Capaian				
			B06 :	Laporan Pemantauan Isu Strategis TW II (Evaluasi Permen 105 tahun 2021 mengenai luasan lahan yang dapat digunakan untuk PLTS)	Rp 25,875,000	50%	B06 :	Rapat Koordinasi lintas K/L, FGD, Kunjungan Lapangan	Laporan Kegiatan capaian output
			B09 :	Laporan Pemantauan Isu Strategis TW III (Pembahasan Aturan Ekspor Listrik Indonesia)	Rp 38,812,500	75%	B09 :	Rapat Koordinasi lintas K/L, Kunjungan Lapangan	Laporan Kegiatan capaian output
			B12 :	Laporan Penyelesaian Target Isu Strategis Terkoordinasinya Pembangunan PLTS Terapung Cirata	Rp 51,750,000	100%	B12 :	Rapat monitoring dan evaluasi	Laporan Kegiatan capaian output

Asisten Deputi
Investasi Bidang Jasa,


Farah Heliantina

**RENCANA AKSI ASISTEN DEPUTI INVESTASI STRATEGIS
DEPUTI BIDANG KOORDINASI INVESTASI DAN PERTAMBANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Komponen	Target Keberhasilan 2023	Target per Triwulan			% Total Anggaran	Uraian Rencana Kegiatan		Evidence	
			Output	Serapan Anggaran	% Target Capaian		(Fishbone)			
Indikator Kinerja : Persentase Rumusan Kebijakan di Bidang Investasi Strategis yang Ditindaklanjuti										
1	Pengendalian Kebijakan Investasi Industri Farmasi dan Alat Kesehatan	Ditindaklanjutinya Rumusan Pengendalian Kebijakan Investasi Industri Farmasi dan Alat Kesehatan	B03 :	Policy Issue (Agenda Kebijakan) BAB I: Latar belakang permasalahan terkait penyempurnaan Inpres no 6 tahun 2016	Rp 122,500,000	25%	23,3%	B03 :	Rapat Koordinasi, FGD, Kunjungan Lapangan, Business Matching Sektor Kesehatan	B03: Policy Memo (BAB I: Latar belakang)
			B06 :	Policy Analysis (Problem Statement) BAB II: Identifikasi isu permasalahan terkait penyempurnaan Inpres 6 tahun 2016	Rp 245,000,000	50%		B06 :	Rapat Koordinasi Penyempurnaan Regulasi, Kunjungan Lapangan	B06: Policy Memo (BAB II: Identifikasi Isu)
			B09 :	Policy Option (Pilihan Kebijakan) BAB III: Tersedianya pilihan kebijakan terkait penyempurnaan Inpres 6 tahun 2016	Rp 367,500,000	75%		B09 :	Rapat Koordinasi Lanjutan terkait regulasi Inpres 6 Tahun 2016, Kunjungan Lapangan	B09: Policy Memo (BAB III: Pilihan Kebijakan)
			B12 :	Policy Paper (Kertas Kerja Kebijakan) BAB IV: Tersedianya kertas kerja kebijakan terkait kebijakan yang direkomendasikan	Rp 490,000,000	100%		B12 :	Rapat Evaluasi dan Monitoring, Kunjungan Lapangan	B09: Policy Paper
					Rp 490,000,000					
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Investasi Industri Hijau	Ditindaklanjutinya Rumusan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Investasi Industri Hijau	B03 :	Policy Issue (Agenda Kebijakan) BAB I: Latar belakang permasalahan terkait Tukar Menukar Aset Barang Milik Daerah (BMD) Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Bulungan	Rp 237,500,000	25%	45,2%	B03 :	Rapat Koordinasi Progres Izin dan Pembangunan Kawasan Industri Tanah Kuning, Kunjungan Lapangan <i>Ground Breaking</i> PLTA Mentarang	B03: Policy Memo (BAB I: Latar belakang)
			B06 :	Policy Analysis (Problem Statement) BAB II: Identifikasi isu permasalahan Tukar Menukar Aset BMD Provinsi Kaltara dan Kabupaten Bulungan	Rp 475,000,000	50%		B06 :	Rapat Koordinasi Progres Pengembangan Sekolah Vokasi Bahasa Mandarin, Rapat Koordinasi terkait Tukar Menukar Aset	B06: Policy Memo (BAB II: Identifikasi Isu)
			B09 :	Policy Option (Pilihan Kebijakan) BAB III: Tersedianya pilihan kebijakan bagi permasalahan TMA BMD Provinsi Kaltara dan Kabupaten Bulungan	Rp 712,500,000	75%		B09 :	Rapat Koordinasi terkait Penyesuaian RTRW dan RDTR, Kunjungan Lapangan Monitoring Progres Pembangunan	B09: Policy Memo (BAB III: Pilihan Kebijakan)
			B12 :	Policy Paper (Kertas Kerja Kebijakan) BAB IV: Tersedianya kertas kerja kebijakan terkait kebijakan yang direkomendasikan	Rp 950,000,000	100%		B12 :	Rapat Koordinasi Progres dan Persiapan Pengalihan BMD, Kunjungan Lapangan Monitoring Progres Pembangunan, Rakor Menko Monitoring dan Evaluasi	B09: Policy Paper
					Rp 950,000,000					
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Investasi Industri Pionir Strategis	Ditindaklanjutinya Rumusan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Investasi Industri Pionir Strategis	B03 :	Policy Issue (Agenda Kebijakan) BAB I: Latar belakang permasalahan terkait Reformasi Tata Kelola Industri Smelter	Rp 103,750,000	25%	19,76%	B03 :	Rapat Koordinasi Level ES I terkait Reformasi Tata Kelola Industri Smelter, Rapat Pembentukan Tim Investigasi, Bimbingan Teknis Pengendalian Pencemaran Udara kepada Industri Smelter	B03: Policy Memo (BAB I: Latar belakang)
			B06 :	Policy Analysis (Problem Statement) BAB II: Identifikasi isu permasalahan terkait Reformasi Tata Kelola Industri Smelter	Rp 207,500,000	50%		B06 :	Bimbingan Teknis Pengendalian Pencemaran Air kepada Industri Smelter, Rapat Koordinasi Tingkat Menteri, Kunjungan Lapangan	B06: Policy Memo (BAB II: Identifikasi Isu)
			B09 :	Policy Option (Pilihan Kebijakan) BAB III: Tersedianya pilihan kebijakan terkait Reformasi Tata Kelola Industri Smelter	Rp 311,250,000	75%		B09 :	Kunjungan Lapangan Lanjutan, Rapat Koordinasi ES II	B09: Policy Memo (BAB III: Pilihan Kebijakan)

			B12 :	Policy Paper (Kertas Kerja Kebijakan) BAB IV: Tersedianya kertas kerja kebijakan terkait kebijakan yang direkomendasikan	Rp 415,000,000	100%		B12 :	Rapat Koordinasi level ES I, Rapat Koordinasi level Menteri	B09: Policy Paper
					Rp 415,000,000					
Indikator Kinerja : Persentase isu-isu strategis yang diselesaikan										
4	Proyek Strategis Nasional Kawasan Industri Tanah Kuning	Terlaksananya Transaksi Pengalihan BMD Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Bulungan, Persetujuan Substansi Revisi RTRW, Berjalannya pendidikan vokasi bahasa Mandarin	B03 :	Laporan Pemantauan Isu Strategis TW I tersedianya hasil diskusi terkait penilaian BMD oleh Tim Penilai Pemerintah (DJKN dan KPKNL)	Rp 37,500,000	25%	7,1%	B03 :	Rapat Koordinasi proses Tukar Menukar Aset, Kunjungan Lapangan Progres Pembangunan	Laporan terkait penilaian BMD oleh Tim Penilaian DJKN dan KPKNL
			B06 :	Laporan Pemantauan Isu Strategis TW II terkait penetapan BMD sebagai objek pajak, Penyelesaian Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), PKS Vokasi Bahasa Mandarin	Rp 75,000,000	50%		B06 :	Rapat Koordinasi Lanjutan proses Tukar Menukar Aset, Rapat Progres Pendidikan Vokasi Bahasa Mandarin	Laporan terkait salinan SK Penetapan BMD sebagai Objek TMA, dokumen KLHS, dan dokumen PKS
			B09 :	Laporan Pemantauan Isu Strategis TW III terkait perjanjian tukar menukar aset, persetujuan substansi, laporan kemajuan pendidikan vokasi mandarin	Rp 112,500,000	75%		B09 :	Rapat Koordinasi Sinkronisasi RDTR dan RTRW, Kunjungan Lapangan	Laporan terkait salinan dokumen Perjanjian Tukar Menukar (TMA) Aset, persetujuan substansi dan kemajuan pendidikan vokasi bahasa Mandarin
			B12 :	Laporan Pemantauan Isu Strategis TW IV terkait BAST Parsial TMA, dan Berita Acara Konsultasi Publik terkait revisi RTRW	Rp 150,000,000	100%		B12 :	Rapat Koordinasi Lanjutan Sinkronisasi RDTR dan RTRW, Kunjungan Lapangan	Laporan terkait salinan dokumen BAST Parsial, dan salinan dokumen Berita Acara Konsultasi Publik terkait revisi RTRW
					Rp 150,000,000					
5	Janji Presiden Mengawal Transformasi Besar Untuk Menciptakan Kesempatan Kerja Yang Seluas-luasnya dan Peningkatan Nilai Tambah	Terlaksananya Perbaikan Tata Kelola Industri Smelter terkait Isu Ketenagakerjaan dan Lingkungan	B03 :	Laporan Pemantauan Isu Strategis TW I terkait hasil koordinasi bersama Kemnaker dan KLHK, dan <i>self assesment</i> pada industri Smelter	Rp 23,750,000	25%	4,5%	B03 :	Rapat Koordinasi persiapan Ground Breaking PLTA Mentarang, Kunjungan Lapangan	Laporan hasil <i>Self Assesment</i> oleh Industri Smelter
			B06 :	Laporan Pemantauan Isu Strategis TW II terkait pendampingan terhadap Industri Smelter, dan pemantauan kunjungan lapangan bersama	Rp 47,500,000	50%		B06 :	Rapat Koordinasi Pemetaan Tata Kelola Industri Smelter, Kunjungan Lapangan	Laporan terkait pendampingan perbaikan terhadap kepatuhan regulasi ketenagakerjaan dan lingkungan, serta hasil pemantauan kunjungan lapangan
			B09 :	Laporan Pemantauan Isu Strategis TW III terkait pelaksanaan Rapat Koordinasi level Menteri perihal monitoring dan evaluasi tenggat waktu penyelesaian isu ketenagakerjaan dan lingkungan oleh Industri Smelter	Rp 71,250,000	75%		B09 :	Kunjungan Lapangan Lanjutan, Rapat Koordinasi Level Menteri	Laporan terkait hasil rapat Menteri perihal monitoring dan evaluasi tenggat waktu penyelesaian isu ketenagakerjaan dan lingkungan oleh Industri Smelter
			B12 :	Laporan Pemantauan Isu Strategis TW III terkait terselesainya isu ketenagakerjaan dan lingkungan pada Industri Smelter, dan tindak lanjut bagi Industri Smelter yang belum taat terhadap regulasi terkait	Rp 95,000,000	100%		B12 :	Rapat koordinasi lanjutan bersama instansi lain di level eselon II dan I	Laporan final reformasi tata kelola industri smelter terkait isu ketenagakerjaan dan lingkungan
					Rp 95,000,000					

Asisten Deputi
Investasi Strategis,



Bimo Wijayanto

**RENCANA AKSI ASISTEN DEPUTI KERJA SAMA INVESTASI PEMERINTAH DAN BADAN USAHA
DEPUTI BIDANG KOORDINASI INVESTASI DAN PERTAMBANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Komponen	Target Keberhasilan 2023	Target per Triwulan			Total Anggaran	Uraian Rencana Kegiatan		Evidence	
			Output	Anggaran	% Target Capaian		(Fishbone)			
Indikator Kinerja : Persentase Rumusan Kebijakan di Bidang Kerja Sama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha yang Ditindaklanjuti										
1	Rumusan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Kerja Sama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha pada Sektor Pertambangan Batubara	Ditindaklanjutinya Rumusan Kebijakan Pengembangan Kerja Sama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha pada Sektor Pertambangan Batubara	B03 :	Policy Issue (Agenda Kebijakan) BAB I: Latar Belakang Penyelesaian Proyek	Rp 149,758,500	25%	Rp 599,034,000	B03	1. Rapat Koordinasi identifikasi isu penyelesaian SPAM Karian - Serpong 2. Rapat Koordinasi Pemantauan Progres Lahan Pipa pada Proyek SPAM Karian Serpong	B03: Policy Memo (BAB I: Latar belakang)
			B06 :	Policy Analysis (Problem Statement) BAB II: Identifikasi Isu	Rp 299,517,000	50%		B06 :	1. Rapat Koordinasi Pemantauan Progres Pengadaan Lahan pada Proyek KSCS di Kabupaten Tangerang 2. Kunjungan kerja SPAM Karian - Serpong	B06: Policy Memo (BAB II: Identifikasi Isu)
			B09 :	Policy Option (Pilihan Kebijakan) BAB III: Tersedianya pilihan kebijakan penyelesaian isu	Rp 449,275,500	75%		B09 :	1. Rapat Koordinasi Pemantauan Progres perjanjian kerjasama SPAM Karian -Serpong 2. Kunjungan kerja SPAM Karian - Serpong	B09: Policy Memo (BAB III: Pilihan Kebijakan)
			B12 :	Policy Paper (Kertas Kerja Kebijakan) BAB IV: Tersedianya	Rp 599,034,000	100%		B12 :	1. Rapat monitoring dan evaluasi pemantauan progres perjanjian kerjasama SPAM Karian - Serpong 2. Kunjungan Kerja	B09: Policy Paper
2	Rumusan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Proyek Kerja Sama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha	Ditindaklanjutinya Rumusan Kebijakan Percepatan Pembangunan Proyek Kerja Sama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha	B03 :	Policy Issue (Agenda Kebijakan) BAB I: Latar Belakang Penyelesaian Permasalahan	Rp 126,166,250	25%	Rp 504,665,000	B03 :	1. Rapat koordinasi identifikasi isu jalan tol Serang - Panimbang 2. Rapat Konsultasi Penegasan Batas Kawasan Hutan pada proyek Jalan Tol Serang - Panimbang	B03: Policy Memo (BAB I: Latar belakang)
			B06 :	Policy Analysis (Problem Statement) BAB II: Identifikasi isu pembebasan lahan Jalan Tol Serang - Panimbang yang akan ditindaklanjuti	Rp 252,332,500	50%		B06 :	1. Rapat terkait Rencana Pelepasan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang Provinsi Banten 2. Pembahasan Penyelesaian Sisa Penlok Tol Serang Panimbang 3. Kunjungan Lapangan	B06: Policy Memo (BAB II: Identifikasi Isu)
			B09 :	Policy Option (Pilihan Kebijakan) BAB III: Tersedianya pilihan kebijakan	Rp 378,498,750	75%		B09 :	1. Rapat Koordinasi Pembahasan penyelesaian relokasi lahan proyek jalan Tol Serang - Panimbang 2. Kunjungan Lapangan	B09: Policy Memo (BAB III: Pilihan Kebijakan)
			B12 :	Policy Paper (Kertas Kerja Kebijakan) BAB IV: Tersedianya	Rp 504,665,000	100%		B12 :	1. Rapat monitoring dan evaluasi progres pembebasan lahan untuk jalan tol Serang - Panimbang 2. Kunjungan Lapangan	B09: Policy Paper
3	Rumusan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Kerja Sama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha pada Sektor Infrastruktur Ekonomi	Ditindaklanjutinya Rumusan Kebijakan Pengembangan Kerja Sama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha pada Sektor Infrastruktur Ekonomi	B03 :	Policy Issue (Agenda Kebijakan) BAB I: Latar Belakang Penyelesaian Isu Pembangunan Kereta Cepat Jakarta - Bandung	Rp 125,146,000	25%	Rp 500,584,000	B03 :	1. Rapat Koordinasi identifikasi isu penyelesaian Kereta Cepat Jakarta - Bandung 2. Kunjungan Kerja Meninjau Kesiapan Peresmian Track Laying pada Proyek KCJB	B03: Policy Memo (BAB I: Latar belakang)
			B06 :	Policy Analysis (Problem Statement) BAB II: Identifikasi Isu penyelesaian Proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung	Rp 250,292,000	50%		B06 :	1. Focus Group Discussion pengamanan proyek KCJB 2. Kunjungan lapangan kesiapan operasional stasiun KCJB	B06: Policy Memo (BAB II: Identifikasi Isu)
			B09 :	Policy Option (Pilihan Kebijakan) BAB III: Tersedianya pilihan kebijakan	Rp 375,438,000	75%		B09 :	1. Rapat koordinasi penyelesaian akses menuju stasiun KCJB 2. Rapat kesiapan operasional dan pemeliharaan KCJB	B09: Policy Memo (BAB III: Pilihan Kebijakan)
			B12 :	Policy Paper (Kertas Kerja Kebijakan) BAB IV: Tersedianya	Rp 500,584,000	100%		B12 :	1. Rapat monitoring dan evaluasi proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung 2. Kunjungan Lapangan	B09: Policy Paper
Indikator Kinerja : Persentase isu-isu strategis yang diselesaikan										
4	Major Project Kereta Cepat Jakarta Bandung	Beroperasinya Kereta Cepat Jakarta Bandung	B03 :	Laporan Pemantauan Isu TW 1 Tersedianya hasil koordinasi progres pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung	Rp 20,241,500	25%		Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi, Kunjungan Lapangan	B03: 1. Laporan rapat koordinasi penyelesaian proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung 2. Laporan kunjungan lapangan proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung	

			B06 :	Laporan Pemantauan Isu TW 2 Tersedianya hasil kunjungan dan koordinasi progres penyelesaian pembangunan Kereta Cepat Jakarta - Bandung	Rp	40,483,000	50%	Rp	80,966,000	B06 :	Kunjungan Lapangan Lanjutan, Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi	B06: 1. Laporan rapat koordinasi dan sinkronisasi proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung 2. Laporan kunjungan lapangan proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung
			B09 :	Laporan Pemantauan Isu TW 3 Tersedianya laporan tindak lanjut koordinasi dan pemantauan progres penyelesaian pembangunan Kereta Cepat Jakarta - Bandung	Rp	60,724,500	75%			B09 :	Kunjungan Lapangan Lanjutan, Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi	B09: 1. Laporan rapat tindak lanjut proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung 2. Laporan kunjungan lapangan proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung
			B12 :	Laporan Pemantauan Isu TW 4 Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi penyelesaian Kereta Cepat Jakarta - Bandung	Rp	80,966,000	100%			B12 :	Kunjungan Lapangan Lanjutan, Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi	B09: 1. Laporan progres percepatan proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung 2. Laporan Monitoring dan Evaluasi proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung
5	Proyek Strategis Nasional Jalan Tol Serang - Panimbang	Penyelesaian Pelepasan Kawasan Hutan dan Sengketa atas Hak Guna Usaha (HGU)	B03 :	Laporan Pemantauan Isu TW 1 Tersedianya hasil koordinasi progres Jalan Tol Serang - Panimbang	Rp	20,083,750	25%			B03 :	Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi, Kunjungan Lapangan	B03: 1. Laporan Rapat Koordinasi penyelesaian proyek Jalan Tol Serang - Panimbang 2. Laporan kunjungan lapangan proyek Jalan Tol Serang - Panimbang
			B06 :	Laporan Pemantauan Isu TW 2 Tersedianya hasil kunjungan dan koordinasi progres Jalan Tol Serang - Panimbang	Rp	40,167,500	50%	Rp	80,335,000	B06 :	Kunjungan Lapangan Lanjutan, Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi	B06: 1. Laporan rapat koordinasi dan sinkronisasi pengadaan lahan jalan tol Jalan Tol Serang - Panimbang 2. Laporan kunjungan lapangan proyek jalan tol Jalan Tol Serang - Panimbang
			B09 :	Laporan Pemantauan Isu TW 3 Tersedianya laporan tindak lanjut koordinasi dan pemantauan progres Jalan Tol Serang - Panimbang	Rp	60,251,250	75%			B09 :	Kunjungan Lapangan Lanjutan, Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi	B09: 1. Laporan tindak lanjut penyelesaian pelepasan kawasan hutan dan Sengketa atas HGU 2. Laporan kunjungan lapangan proyek jalan tol Jalan Tol Serang - Panimbang
			B12 :	Laporan Pemantauan Isu TW 4 Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi Proyek Jalan Tol Serang - Panimbang	Rp	80,335,000	100%			B12 :	Kunjungan Lapangan Lanjutan, Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi	B09: 1. Laporan rapat progres percepatan proyek Jalan Tol Serang - Panimbang 2. Laporan Monitoring dan Evaluasi penyelesaian Jalan Tol Serang - Panimbang
6	Proyek Strategis Nasional SPAM Karian - Serpong	Terlaksananya Perjanjian Kerja Sama antara PIPK dengan Badan Usaha SPAM Karian - Serpong	B03 :	Laporan Pemantauan Isu TW 1 Tersedianya hasil koordinasi progres SPAM Karian - Serpong	Rp	33,604,000	25%			B03 :	Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi, Kunjungan Lapangan	B03: 1. Laporan rapat koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian proyek SPAM Karian - Serpong 2. Laporan kunjungan lapangan proyek SPAM Karian - Serpong
			B06 :	Laporan Pemantauan Isu TW 2 Tersedianya hasil kunjungan dan koordinasi progres SPAM Karian - Serpong	Rp	67,208,000	50%	Rp	134,416,000	B06 :	Kunjungan Lapangan Lanjutan, Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi	B06: 1. Laporan rapat koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian proyek SPAM Karian Serpong 2. Laporan kunjungan lapangan proyek SPAM Karian - Serpong
			B09 :	Laporan Pemantauan Isu TW 3 Tersedianya laporan tindak lanjut koordinasi dan pemantauan progres SPAM Karian - Serpong	Rp	100,812,000	75%			B09 :	Kunjungan Lapangan Lanjutan, Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi	B09: 1. Laporan tindak lanjut penyelesaian perjanjian kerja sama antara PIPK dengan Badan Usaha SPAM Karian - Serpong 2. Laporan kunjungan lapangan proyek SPAM Karian - Serpong

			Laporan Pemantauan Isu TW 4 Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi progres SPAM Karian - Serpong	Rp 134,416,000	100%		Kunjungan Lapangan Lanjutan, Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi	B09: 1. Laporan progres percepatan proyek SPAM Karian - Serpong 2. Laporan Monitoring dan Evaluasi proyek SPAM Karian - Serpong
--	--	--	--	----------------	------	--	--	---

Asisten Deputi
 Kerja Sama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha,


 Hari Kusmardianto

**RENCANA AKSI ASISTEN DEPUTI PERTAMBANGAN
DEPUTI BIDANG KOORDINASI INVESTASI DAN PERTAMBANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Komponen	Target Keberhasilan 2023	Target per Triwulan			Total Anggaran	Uraian Rencana Kegiatan		Evidence Antara Triwulan	
			Output	Anggaran	% Target Capaian		(Fishbone)			
Indikator Kinerja : Persentase Rumusan Kebijakan di Bidang Pertambangan yang Ditindaklanjuti										
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Mineral Kritis Indonesia	Ditindaklanjutinya Rumusan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Mineral Kritis Indonesia	B03 :	Policy Issue (Agenda Kebijakan) / Bab I Identifikasi Mineral Kritis dan Mineral Strategis	Rp 105,000,000	25%	Rp 420,000,000	B03 :	Rapat Internal Mineral Kritis : Rp 45.000.000 Rapat Teknis Mineral Kritis : Rp 60.000.000	Policy Memo Identifikasi Mineral Kritis dan Mineral Strategis
			B06 :	Policy Analysis (Problem Statement) / Bab II Tersedianya Data Mineral Kritis dan Mineral Strategis	Rp 210,000,000	50%		B06 :	Kunjungan Lapangan Survey Lokasi Mineral Kritis : Rp 85.000.000 Rapat Koordinasi Mineral Kritis dan Strategis : Rp 25.000.000	Policy Memo Tersedianya Data Mineral Kritis dan Mineral Strategis
			B09 :	Policy Option (Pilihan Kebijakan) / Bab III Tersedianya Pilihan Kebijakan Tata Kelola Mineral Kritis dan Mineral Strategis	Rp 315,000,000	75%		B09 :	FGD Tata Kelola Mineral Kritis dan Mineral Strategis : Rp 65.000.000 Rapat Koordinasi Perpres Mineral Kritis : Rp 50.000.000	Policy Memo Tersedianya Pilihan Kebijakan Tata Kelola Mineral Kritis dan Mineral Strategis
			B12 :	Policy Paper (Kertas Kerja Kebijakan) / Bab IV Tersedianya Dokumen Rancangan Draf Perpres	Rp 420,000,000	100%		B12 :	FGD Sosialisasi Mineral Kritis : Rp 80.000.000 Rapat Koordinasi Evaluasi Mineral Kritis : Rp 25.000.000	Policy Paper Tersedianya Dokumen Rancangan Draf Perpres Mineral Kritis dan Mineral Strategis
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Penatakelolaan Mineral dan Batubara Indonesia	Ditindaklanjutinya Rumusan Pengendalian Kebijakan Peningkatan Kualitas Penatakelolaan Mineral dan Batubara Indonesia	B03 :	Policy Issue (Agenda Kebijakan) / Bab I Identifikasi Isu PETI dan SIMBARA	Rp 208,500,000	25%	Rp 834,000,000	B03 :	Rapat Internal SIMBARA : Rp 58.500.000 Kunjungan Lapangan Monitoring PETI : Rp 150.000.000	Policy Memo Identifikasi Isu PETI dan SIMBARA
			B06 :	Policy Analysis (Problem Statement) / Bab II Tersedianya Naskah Akademik SIMBARA	Rp 417,000,000	50%		B06 :	FGD Monitoring PETI dan SIMBARA : Rp 50.000.000 Rapat Koordinasi PETI dan Monitoring SIMBARA : Rp 50.000.000 Kunjungan Lapangan Monitoring SIMBARA : Rp 108.500.000	Policy Memo Tersedianya Naskah Akademik SIMBARA
			B09 :	Policy Option (Pilihan Kebijakan) / Bab III Tersedianya Pilihan Kebijakan Tata Kelola PETI dan Monitoring SIMBARA	Rp 625,500,000	75%		B09 :	Kunjungan Lapangan : Rp 158.500.000 Rapat Teknis Perpres SIMBARA : Rp 50.000.000	Policy Memo Tersedianya Pilihan Kebijakan Tata Kelola PETI dan Monitoring SIMBARA
			B12 :	Policy Paper (Kertas Kerja Kebijakan) / Bab IV Tersedianya Dokumen Rancangan Perpres SIMBARA	Rp 834,000,000	100%		B12 :	FGD Penyelesaian PETI : Rp 108.500.000 Rapat Koordinasi Perpres SIMBARA : Rp 100.000.000	Policy Paper Tersedianya Dokumen Rancangan Perpres SIMBARA
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Optimalisasi Kinerja Hilirisasi Mineral dan Batubara di Indonesia	Ditindaklanjutinya Rumusan Pengendalian Kebijakan Optimalisasi Kinerja Hilirisasi Mineral dan Batubara di Indonesia	B03 :	Policy Issue (Agenda Kebijakan) / Bab I Identifikasi Isu Optimalisasi Kinerja Hilirisasi Minerba	Rp 186,500,000	25%	Rp 746,000,000	B03 :	Rapat Internal Proses Bisnis dan Pohon Industri Mineral : Rp 46.500.000 Kunjungan Lapangan Proses Bisnis Hilirisasi Timah : Rp 140.000.000	Policy Memo Identifikasi Isu Optimalisasi Kinerja Hilirisasi Minerba
			B06 :	Policy Analysis (Problem Statement) / Bab II Tersedianya Data Isu Optimalisasi Kinerja Hilirisasi Minerba	Rp 373,000,000	50%		B06 :	Rapat Koordinasi Proses Bisnis Timah dan Bauksit : Rp 46.500.000 Kunjungan Lapangan Proses Bisnis Hilirisasi Bauksit : Rp 140.000.000	Policy Memo Tersedianya Data Isu Optimalisasi Kinerja Hilirisasi Minerba
			B09 :	Policy Option (Pilihan Kebijakan) / Bab III Tersedianya Pilihan Kebijakan Isu Optimalisasi Hilirisasi Minerba	Rp 559,500,000	75%		B09 :	FGD Proses Bisnis Tembaga : Rp 46.500.000 Kunjungan Lapangan Proses Bisnis Hilirisasi Tembaga : Rp 140.000.000	Policy Memo Tersedianya Pilihan Kebijakan Isu Optimalisasi Hilirisasi Minerba
			B12 :	Policy Paper (Kertas Kerja Kebijakan) / Bab IV Tersedianya Kertas Kerja Kebijakan Optimalisasi Hilirisasi Minerba	Rp 746,000,000	100%		B12 :	FGD Evaluasi Proses Bisnis Timah dan Bauksit : Rp 100.000.000 Rapat Koordinasi Evaluasi Proses Bisnis Timah dan Bauksit : Rp 86.500.000	Policy Paper Tersedianya Kertas Kerja Kebijakan Optimalisasi Hilirisasi Minerba
Indikator Kinerja : Persentase isu-isu strategis yang diselesaikan										
4	Major Project Pembangunan Smelter	Penyelesaian Pemasalahan Major Project Pembangunan Smelter	B03 :	Laporan Pemantauan Isu TW 1 (Tersedianya Hasil Identifikasi Permasalahan Pembangunan Smelter Major Project)	Rp 25,000,000	25%	Rp 100,000,000	B03 :	Koordinasi Identifikasi Permasalahan Pembangunan Smelter Major Project	Laporan Kegiatan Identifikasi Permasalahan Pembangunan Smelter Major Project
			B06 :	Laporan Pemantauan Isu TW 2 (Tersedianya Hasil Analisa Permasalahan Pembangunan Smelter Major Project)	Rp 50,000,000	50%		B06 :	Koordinasi dan Sinkronisasi Analisis Permasalahan Pembangunan Smelter Major Project	Laporan Kegiatan Analisa Permasalahan Pembangunan Smelter Major Project
			B09 :	Laporan Pemantauan Isu TW 3 (Tersedianya Rekomendasi Solusi atas Permasalahan Pembangunan Smelter Major Project)	Rp 75,000,000	75%		B09 :	Koordinasi dan Sinkronisasi terkait Penyusunan Rekomendasi atas Permasalahan Pembangunan Smelter Major Project	Laporan Kegiatan Rekomendasi Solusi atas Permasalahan Pembangunan Smelter Major Project
			B12 :	Laporan Pemantauan Isu TW 4 (Tersedianya Hasil Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Smelter Major Project)	Rp 100,000,000	100%		B12 :	Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Smelter	Laporan Kegiatan Monitoring dan evaluasi pembangunan Smelter Major Project

Asisten Deputi Pertambangan,



Tubagus Nugraha